#### **BABI**

### **PENDAHULUAN**

## A. Latar Belakang Masalah

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya dalam bentuk kredit dan atau dengan bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. (Pasal 1 UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan)

Selanjutnya dalam perkembangannya, sejak diberlakukannya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang diperkuat dengan Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 sebagai pengganti Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992, maka mulai diakuinya bahwa system perbankan Indonesia menganut *dual banking system,* yakni Bank Konvensional dan Bank Syariah.

Bila melihat sistem perbankan Indonesia ditinjau dari sistem perbankan dunia pada umumnya, ada perbedaan yang sangat signifikan. Sejak diberlakukannya Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 di Indonesia dikenal dengan *dual banking system*, perbankan konvensional disatu sisi dan perbankan syariah di sisi lainnya. Walaupun terdapat dua perbedaan sistem

operasional, namun, secara struktural tetap di bawah naungan Bank Indonesia.<sup>1</sup>

Dual Banking System adalah terselenggaranya dua sistem perbankan (konvensional dan syariah) secara berdampingan. Strategi ini dilakukan berdasarkan pengalaman masa krisis bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah dapat bertahan di tengah gejolak nilai tukar dan tingkat suku bunga yang tinggi. Keberadaan dua sistem perbankan yang berkembang secara pararel dan yang mempunyai hubungan keuangan terbatas satu sama lain diharapkan akan dapat menciptakan diversifikasi resiko yang pada gilirannya akan mengurangi masalah systemic risk pada saat terjadi krisis keuangan

Kedua bank tersebut pasti mempunyai asset yang digunakan untuk cadangan dalam mengatasi resiko likuiditas bank, yang selanjutnya dapat digunakan sebagai landasan pemberian kredit (jika dalam konvensional) dan pemberian pembiayaan (jika dalam syariah). Sumber terbesar pendapatan perbankan adalah dari Dana Pihak Ketiga (DPK), dan DPK tersebutlah yang dapat dijadikan bank sebagai dasaran kebijakan dalam penyaluran dananya.

Bidang ekonomi, yang merupakan salah satu tulang punggung tegaknya tatanan mayarakat yang dinamis, mendapat perhatian yang khusus dalam Islam. Islam sangat memperhatikan dari atau bagaimana harta (hasil kegiatan ekonomi) itu diperoleh dan untuk apa harta itu digunakan. Oleh karena Islam melarang mendapatkan harta dengan cara pencurian, perbuatan curang, judi,

-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Maulana Hamzah, "Optimalisasi Peran Dual Banking System Melalui Fungsi Strategis JUB dalam Rangka Menjaga Stabilitas Sistem Keuangan di Indonesia", *La\_Riba*, Vol 3, No 2, Desember 2009, 199.

penjualan barang haram, dan tak kalah gencarnya yang diperangi oleh Islam adalah riba.<sup>2</sup>

Islam merupakan ajaran yang sempurna, menyempurnakan dan universal yang telah diberikan oleh Allah kepada manusia di bumi sebagai pemimpin dan berkewajiban memakmurkannya baik secara horizontal yaitu hubungan antar sesama manusia dan vertikal yaitu hubungan dengan Tuhan yang berupa ibadah ritual seperti sholat, zakat dan sebagainya.

Sebagai bentuk totalitas sebagai muslim, dalam memenuhi kegiatan perekonomian, perbankan baik konvensional maupun perbankan syariah memberikan pembiayaan terhadap lembaga keungan mikro yang berstadarkan atau berasaskan Islam y<mark>ang selanjutnya disebut dengan *Islamic Microfinance*</mark> dan dalam hal ini disebut dengan BMT (Baitul Māl Wat Tamwil).

Indonesia is probably the country with the greatest diversity of both conventional and Islamic microfinance, the former evolving over a period of over one hundred years, preceded by a history of informal finance of unknown differentiated microfinance infrastructures in the developing world, comprising some 6,000 formal and 48,000 semiformal registered microfinance unit serving about 45 million depositors and 32 million borrowers, 800,000 channeling groups, and millions of informal financial institutions and self help groups. Thre is hardly an institutional type of microfinance that is not found in Indonesia. One of the most successful microfinance models worldwide, the reformed village unit of Bank Rakyat

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Andriani, "Baitul Ma@l wat Tamwil (Konsep dan Mekanisme di Indonesia)", Empirisma, Vol 14, No.2, Juli, 2005, 249.

Indonesia (BRI), were designed by the Harvard Institute for Internatioal Development in the early 1980s.<sup>3</sup>

Comprehensive Islamic Microfinance should involve not only credit trough debt finance, but the provision of equity financing via mudharabah and musharakah, saving schemes via wadiah and mudharabah deposits, money transfers such as trough sakat and sadaqoh, and insurance via takaful concept.<sup>4</sup>

BMT is one kind of Islamic Microfinance institute which save and distribute fund for micro entrepreneur. Most members of Baitul Māl wat Tamwil (BMT) in Indonesia are unbankable. They need financial instution which is not only giving a financing but also spporting the members to be survival in their business. BMT as a shariah microfinance is more innovative than the others financial instution, hopefully, it will become the one of solutions to alleviate poor peoples.<sup>5</sup>

Pembiayaan atau kredit perbankan juga diberikan secara langsung kepada para pelaku UMKM di Indonesia. Pemberian pembiayaan atau kredit tersebut diberikan oleh bank sebagai bentuk tanggungjawab dalam mensejahterakan taraf kehidupan masyarakat.

<sup>4</sup> Comptroller of the Currency Administrator of National Banks, "Nasional Banks and The Dual Banking System", *Washington, DC 20219*, September 2013, 1.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Hans Dieter Seibel, "Islamic Microfinance in Indonesia: The Challenge of Instutional Diversity, Regulation and Supervision", *University of Cologne*, Germany, 2007, 1.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Muhammad Nadratuzzaman Hosen dan Lia Syukriyah Sa'roni, "Determinant Factors of the Successful of Baitul Ma@l wat Tamwil (BMT)", *International Journal of Academic Research in Economic and Management Sciences*, Agustus 2012, 1.

Secara otomatis, bank mendapatkan konsekwensi logis dalam tujuannya meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak yaitu diukur dari PDB (Produk Domestik Bruto) Indonesia.

Keterbatasan akses sumber sumber pembiayaan yang dihadapi oleh UKM khususnya pelaku usaha kecil dan mikro terutama dari lembaga lembaga keuangan formal seperti perbankan, menyebabkan mereka bergantung pada sumber-sumber yang beraneka ragam, mulai dari pelepas uang (*rentenir*) hingga berkembang dalam bentuk unit-unit simpan pinjam, koperasi dan bentuk-bentuk yang lain.<sup>6</sup>

Perkembangan UMKM diperkirakan lebih baik karena makin terbukanya kesempatan berusaha serta adanya konsolidasi di kalangan UMKM dalam mengatasi keterbatasan akses permodalan. Sejak krisis keuangan, sektor UMKM tetap bisa berjalan meskipun tidak didukung kebijakan yang tepat dari pemerintah maupun kredit perbankan. Dalam keadaan sulit seperti itu, UMKM belajar bagaimana menciptakan peluang-peluang baru termasuk mengatasi salah satu kelemahannya yaitu keterbatasan modal dengan cara *sharing* dengan sesama pengusaha dengan pola bagi hasil.<sup>7</sup>

Keberadaan lembaga keuangan mikro (*microfinance*), tidak bisa dilepaskan dengan adanya usaha mikro kecil menengah yang semakin hari

Adetya Nur Candra dan Arif Hoetoro, "Pengaruh Elastistas Produk Domestik Bruto (PDB)

terhadap Penyerapan Tenaga Kerja pada Sektor UMKM", *Jurnal Ilmiah*, Universitas Brawijaya 2013, 4.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Wiloejo Wirjo Wijono, "Pemberdayaan Lembaga Keuangan Mikro sebagai salah satu Pilar Sistem Keuangan Nasional: Upaya Konkrit Memutuskan Mata Rantai Kemiskinan", *Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan*, edisi khusus Desember 2005, Jakarta, 2.

semakin bertambah banyak. Perkembangan tersebut, dapat memunculkan kejadian yang menyiratkan bahwa ada kemungkinan semakin bertambahnya kekuatan domestik.

Hal tersebutlah, menyebabkan perkembangan *Islamic Microfinance* (BMT/KJKS) mampu meningkatkan PDB Indonesia melalui pemberian pembiayaan terhadap UMKM, yang dalam praktiknya disebut dengan anggota. Anggota yang sebagian besarnya adalah pelaku UMKM dengan volume usaha tertentu dapat mempengaruhi asset BMT yang selama ini dijadikan koperasi dan koperasi syariah yang biasa disebut dengan KJKS/BMT atau dalam hal ini disebut dengan *Islamic Microfinance* sebagai dasaran pemberian pinjaman kepada UMKM.

Kinerja UMKM yang baik dalam aspek keuangan dan juga aspek manajemennya dapat diukur pada semakin banyaknya jumlah UMKM yang mempengaruhi jumlah tenaga kerjanya dan pada akhirnya berpengaruh pada ekspor non migas oleh UMKM yang pasti dapat mempengaruhi PDB karena nominalnya yang besar.

Sektor usaha mikro, kecil, menengah di Indonesia sangat potensial dikembangkan. Karena ini terbukti memberikan kontribusi 57,12 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Kementerian Koperasi dan UKM menyatakan, jumlah UKM di Indonesia mencapai 55,2 juta unit atau 99,98 persen dari total unit usaha di Indonesia. Bahkan sektor ini telah menyerap

101,72 juta orang tenaga kerja atau 97,3 persen dari total tenaga kerja Indonesia.<sup>8</sup>

Indonesia is the fourth largest country in the world in terms of population with 237.5 milion people, with 88% of them being muslims, making is the largest muslim population country (based on 2010 Indonesian census). However, Indonesia also has other religions including Protestants, Roman Catholics, Hindus and Buddhists. Indonesian economy is dominated by micro, small, medium enterprises (MSME') wich together constitute 99% of the total business. Micro finance enterpraises themselves dominate 98.85% of total business absorbing 90.98% of the total labor force and contributing 57.12% to GDP in 2010 (Indonesia Bureau Statistics, 2011) these figures show that micro businesses play a strategic role in Indonesia economy. The Indonesian banking institutions are categorized into commercial and rural banks. In Feb 2011, there were 122 commercial banks and 1822 rural banks. Of the rural banks, the ones that are Islamic are only 151 with 291 total bank offices.

Kinerja UMKM jika dilihat dari sisi perkembangan UMKM dan tenaga kerjanya akan berpengaruh terhadap PDB. Sumbangan dari sektor UMKM terhadap PDB dapat dilihat pada gambar berikut<sup>10</sup>:

<sup>8</sup> ANP/MKS "Sektor UKM menyerap 97,3% dari Total Tenaga Kerja Indonesia", dalam www.sindotrijayafm.com 05 Juni 2013, diakses pada 24 Maret 2014 12:12

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Dian Mashita dan Habib Ahmed, "Why is Growth of Islamic Micro Finance Lower Than its Conventional Counterparts in Indonesia?", *Islamic Economic Strategis*, Vol 21, No 1, June, 2013, 36.

Nur Candra dan Hoetoro, "Pengaruh Elastistas Produk Domestik Bruto (PDB) terhadap Penyerapan Tenaga Kerja pada Sektor UMKM", *Jurnal Ilmiah*, Universitas Brawijaya 2013, 5.

Gambar 1:
PDB harga konstan tahun 2000<sup>11</sup>

PDB Atas Harga Konstan 2000	Tahun			
	2006	2007	2008	2009
1, UMKM	1.035.615,3	1.100.670,9	1.165.753,2	1,212,599,3
2. Usaha Besar	734.893,0	782.878,2	832,184,8	876.459,2
Jumlah	1.770.508,3	1.883.549,1	1.997.938,0	2.089.058,5

PDB Atas Harga	Tahun		
Konstan 2000	2010	2011	
1, UMKM	1,282,571,8	1,369,326,0	
2. Usaha Besar	935.375,2	1.007.784,0	
Jumlah	2,217,947,0	2.377.110.0	

Sumber: www.depkop.go.id (2012)

Menurut Herlambang, besarnya PDB suatu negara dapat menjadikan bahan gambaran oleh bank dunia dalam menentukan apakah suatu negara berada dalam kelompok negara maju atau negara berkembang. PDB diyakini sebagai indikator ekonomi terbaik dalam menilai perkembangan ekonomi suatu negara. Perhitungan pendapatan nasional ini mempunyai ukuran makro utama tentang kondisi suatu negara. Pada umumnya, perbandingan kondisi antar negara dapat dilihat dari pendapatan nasional negara tersebut.

Berdasarkan pada pengelompokan kegiatan ekonomi, PDB dikelompokkan menjadi tiga sektor, yaitu sektor primer (sektor pertanian dan sektor pertambangan), sektor sekunder (sektor industri, sektor listrik, gas dan air bersih, dan sektor konstruksi) dan sektor tersier (sektor perdagangan, sektor pengangkutan, sektor keuangan dan sektor jasa-jasa).

Pada uraian di atas, *Dual Banking System* sebagai sistem perbankan saat ini di Indonesia, maka dituntut untuk menjalankan tugasnya yaitu

\_

<sup>11</sup> www.depkop.go.id (2012)

mensejahterakan taraf hidup masyarakat yaitu dengan cara penyaluran dananya. Indonesia sebagai negara dengan mayoritas muslim, membuat masyarakat mempertimbangkan keputusannya dalam mencari dana yang digunakan untuk membantu usahanya.

Islamic Microfinance dalam hal ini BMT hadir sebagai alternative lembaga keuangan mikro syariah bagi masyarakat yang unbankable, selanjutnya oleh masyarakat digunakan untuk usaha, baik pada sektor mikro, kecil dan menengah yang berdasarakan pada penelitian penelitian yang sudah disebutkan diatas, UMKM sebagai penyumbang terbesar pertumbuhan perekonomian yang diukur dengan PDB.

### B. Identifikasi dan Batasan Masalah

# 1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah tersebut, maka dapat ditemukan identifikasi masalah sebagai berikut:

a. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menyebutkan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya dalam bentuk kredit dan atau dengan bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Hal tersebut menimbulkan adanya tuntutan bagi perbankan, yang dalam hal ini merupakan permasalahan yaitu untuk selalu mengelola dananya baik disalurkan melalui lembaga keuangan mikro yang tujuannya adalah penyaluran kepada UMKM maupun bank tersebut langsung menyalurkan dananya

- kepada UMKM. Sebagaimana yang disebutkan di atas bahwasannya UMKM sangatlah berpengaruh pada struktur PDB di Indonesia.
- b. Sistem perbankan Indonesia menganut *dual banking system*, yaitu dipraktikkannya dua system bank (Bank Konvensional dan Bank Syariah) secara bersamaan dan berada dalam satu kepemimpinan yaitu oleh Bank Indonesia. Karena inilah memunculkan suatu permasalahan yaitu sikap harus hati-hati para pengelola lembaga keuangan mikro yang dimaksud disisni adalah *Islamic Microfinance* dalam pengambilan keputusan pengambilan pembiayaan yang akan dilaksanakan dan menjadi salah satu sumber pendapatannya yang digunakan untuk penyaluran dana (pemberian pembiayaan) kepada UMKM.
- c. Sektor usaha mikro kecil menengah di Indonesia sangat potensial dikembangkan. Hal inilah yang menyebabkan munculnya permasalahan, yaitu adanya keterbatasan para pengusaha UMKM dalam pencarian dananya. Dan merupakan sebuah permasalahan. Sehingga mereka para penduduk Indonesia yang mayoritas adalah muslim lebih mengutamakan untuk mengambil pinjaman dana pada *Islamic Microfinance* karena aksesnya yang mudah dan cenderung aman bagi kalangan muslim.
- d. Perkembangan *Islamic Microfinance*, yang tidak mampu dilepaskan dengan perkembangan UMKM. Permasalahan terletak pada mayoritas muslim masyarakat Indonesia dan juga kesulitan akses dalam

pencarian dana, sehingga memilih *Islamic* Microfinance sebagai lembaga keuangan untuk membantu proses usahanaya dan menyebabkan keduanya berkembang secara bersamaan.

e. PDB diyakini sebagai indikator ekonomi terbaik dalam menilai perkembangan ekonomi suatu Negara. Perhitungan pendapatan nasional ini mempunyai ukuran makro utama tentang kondisi suatu negara. Karena permasalahan inilah, UMKM yang ada di Indoesia dikatakan mampu meningkatkan PDB karena kinerjanya yang ada di Indonesia dan dilakukan oleh warga negara Indonesia.

### 2. Batasan Masalah

Batasan masalah pada penelitian ini adalah meneliti tentang keefektifan/besar peran masing-masing variable dependen, dalam PLS (*Partial Least Square*) dijelaskan bahwa variabel dependen juga dapat menjadi variable perantara. Penelitian ini menitikberatkan pada tingkat keefektifan peran masing-masing variable dependen yang dalam fungsinya juga sebagai variable perantara untuk peningkatan perekonomian Indonesia yang digambarkan dengan peningkatan nominal struktur PDB, dengan gambaran sebagai berikut:

- a. Hanya membahas pengaruh *Dual Banking System* pada perkembangan *Islamic Microfinance*,
- Hanya membahas pengaruh Dual Banking System pada kinerja
   UMKM,

- c. Hanya membahas pengaruh *Dual Banking System* pada struktur PDB di Indonesia,
- d. Hanya membahas pengaruh *Islamic Microfinance* pada kinerja UMKM,
- e. Hanya membahas pengaruh *Islamic Microfinance* pada struktur PDB di Indonesia,
- f. Hanya membahas pengaruh UMKM pada struktur PDB di Indonesia.

### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah dan identifikasi masalah tersebut diatas, maka dapat dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

- 1. Apakah *Dual Banking System* berpengaruh pada perkembangan *Islamic Microfinance?*
- 2. Apakah *Dual Banking System* berpengaruh pada kinerja UMKM?
- 3. Apakah *Dual Banking System* berpengaruh pada struktur PDB di Indonesia?
- 4. Apakah perkembangan *Islamic Microfinance* berpengaruh pada kinerja UMKM?
- 5. Apakah perkembangan *Islamic Microfinance* berpengaruh pada struktur PDB di Indonesia?
- 6. Apakah kinerja UMKM berpengaruh pada struktur PDB di Indonesia?

# D. Tujuan Penelitian

Merujuk pada uraian latar belakang yang selanjutnya dapat ditarik rumusan masalahnya, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

- Untuk mencermati/menganalisis seberapa besar pengaruh *DualBanking* System terhadap perkembangan *Islamic Microfinance*
- 2. Untuk mencermati/menganalisis seberapa besar pengaruh *DualBanking*System terhadap kinerja UMKM
- 3. Untuk mencermati/menganalisis seberapa besar pengaruh *DualBanking*System terhadap struktur PDB di Indonesia
- 4. Untuk mencermati/menganalisis seberapa besar pengaruh Perkembangan Islamic Microfinance terhadap kinerja UMKM
- Untuk mencermati/menganalisis seberapa besar pengaruh *Islamic Microfinance* berpengaruh pada struktur PDB di Indonesia
- 6. Untuk mencermati/menganalisis seberapa besar pengaruh kinerja UMKM berpengaruh terhadap struktur PDB di Indonesia

# E. Kegunaan Penelitian

- 1. Sisi Praktis
  - a. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai tambahan bahan pertimbangan dalam melaksanakan kebijakan oleh para pengambil kebijakan pemberian pembiayaan/kredit *Dual Banking System*, sejauhmana pemberian pembiayaan/kredit tersebut bermanfaat bagi struktur PDB di Indonesia, baik melalui pemberian pembiayaan/kredit

tersebut melalui *Islamic Microfinance* yang kemudian disalurkan kepada UMKM, atau langsung penyaluran kepada UMKM ataupun langsung berpengaruh terhadap struktur PDB dengan pemberian pembiayaan/kredit tanpa perantara tersebut.

b. Hasil Penelitian ini dapat digunakan sebagai tambahan bahan pertimbangan dalam melaksanakan kebijakan oleh para pengambil kebijakan pemberian pembiayaan *Islamic Microfinance*, sejauhmana pemberian pembiayaan tersebut bermanfaat bagi struktur PDB di Indonesia, yang penyalurannya melalui UMKM.

### 2. Sisi Teoritis

- a. Hasil penelitian ini untuk mengetahui keefektifan peran *Dual Banking*System terhadap perkembangan *Islamic Microfinance*
- b. Hasil penelitian ini untuk mengetahui keefektifan peran *DualBanking*System terhadap kinerja UMKM
- c. Hasil penelitian ini untuk mengetahui keefektifan peran *DualBanking* System terhadap struktur PDB di Indonesia
- a. Hasil penelitian ini untuk mengetahui keefektifan peran Perkembangan *Islamic Microfinance* terhadap kinerja UMKM
- d. Hasil penelitian ini untuk mengetahui keefektifan peran *Islamic Microfinance* terhadap struktur PDB di Indonesia
- e. Hasil penelitian ini untuk mengetahui keefektifan peran kinerja
  UMKM terhadap struktur PDB di Indonesia

### F. Sistematika Penelitian

Bab pertama berisi tentang gambaran umum mengenai sistematika penelitian secara menyeluruh. Di mulai dengan penjelasan mengenai latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan kegunaan penelitian.

Bab kedua menguraikan teori-teori yang digunakan sebagai dasar membuat hipotesa. Adapun sumber teori-teori adalah berasal dari berbagai buku referensi, jurnal, dan sumber lain yang dianggap representative sebagai pengayaan teori penelitian yang dapat dijadikan sebagai dasar hipotesa.

Bab ketiga menguraikan jenis penelitian, metode pengumpulan data, metode analisis data dan tekhnik analisis data. Dalam pengumpulan data, penulis mengambil data-data sekunder yang bersumber pada website resmi yang dimiliki oleh masing-masing variabel.

Bab keempat menyajikan hasil penelitian, yang meliputi output dari pengolahan data pada PLS (*Partial Least* Square) dan analisis data yang berupa interpretasi hasil output yang didapatkan.

Bab kelima berisikan tentang kesimpulan dan saran yang merujuk pada hasil penelitian dan analisis data pada bab sebelumnya.